

Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan

Silvia N Rajagukguk

Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 19, 2025

Available online May 25, 2025

Kata Kunci:

BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal, kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, jaminan kerja

Keywords:

BPJS Ketenagakerjaan, informal workers, social welfare, social protection, employment security



This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja informal di kawasan Padang Bulan, Kota Medan. Pekerja informal merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko kerja karena tidak memiliki hubungan kerja formal, perlindungan hukum ketenagakerjaan, maupun akses otomatis terhadap jaminan sosial. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman dan persepsi para pekerja informal terkait partisipasi mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan rasa aman finansial dan sosial, khususnya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, partisipasi pekerja informal masih tergolong rendah akibat berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, birokrasi yang rumit, dan ketidakstabilan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih partisipatif serta kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan di sektor informal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of BPJS Ketenagakerjaan in improving the social welfare of informal workers in the Padang Bulan area, Medan City. Informal workers are a group that is vulnerable to various work risks because they do not have a formal employment relationship, employment legal protection, or automatic access to social security. Through a qualitative approach, this study explores the experiences and perceptions of informal workers regarding their participation in the BPJS Ketenagakerjaan program. The results of the study indicate that BPJS Ketenagakerjaan plays an important role in providing a sense of financial and social security, especially through the Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKm), and Old Age Security (JHT) programs. However, the participation of informal workers is still relatively low due to various obstacles such as lack of understanding, distrust of the effectiveness of the program, complicated bureaucracy, and income instability. Therefore, a more participatory socialization strategy is needed as well as more inclusive and adaptive policies to expand the scope of social protection for workers in the informal sector.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mencapai perkembangan manusia Indonesia secara keseluruhan dan kemajuan masyarakat Indonesia agar tercipta kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran yang merata, baik secara material maupun spiritual, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks pembangunan nasional, pekerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan dari pembangunan ekonomi negara ini. Mengingat peran dan kedudukan tenaga kerja, serta lembaga yang melindungi hak-hak dan kesejahteraan mereka, perlu ada pengembangan bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan keinginan dalam membangun serta memperjuangkan hak dan tanggung jawab, serta martabat sebagai manusia utuh. Pembangunan ketenagakerjaan harus dikelola dengan baik dan efisien agar dapat memenuhi hak dan kewajiban pekerja sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional, sebagai kesatuan dalam mengembangkan sektor usaha, bisnis, dan industri negara.

Maka perlu adanya upaya yang efektif dari lembaga yang mengeluarkan program-program peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, pelayanan penempatan kerja, dan

pembinaan hubungan perusahaan dan industrial. Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional antar pusat dan daerah. Tenaga kerja di Indonesia saat ini sangat memerlukan adanya jaminan sosial bagi diri mereka, karena dengan adanya jaminan sosial yang diterima oleh mereka membuat mereka semakin fokus dalam melaksanakan tugasnya hingga selesai.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesempatan dan kesamaan hak di depan pihak manapun dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja, pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas atau program kesejahteraan (Pasal 100 ayat 1 UU No. 13/2003).

Jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah tertuang dalam aturan yang di buat oleh pemerintah. Pemerintah sangat mengapresiasi tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan memberikan berupa jaminan sosial bagi mereka, yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Yang mana BPJS Ketenagakerjaan ini didapat ketika mereka diterima menjadi pekerja (tenaga kerja) disuatu badan atau perusahaan serta lapangan kerja lainnya tanpa terkecuali. Berbicara mengenai jaminan sosial bagi tenaga kerja, jaminan sosial terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu: jaminan kematian (JKM), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).

Di kawasan **Padang Bulan, Kota Medan**, aktivitas ekonomi informal berkembang pesat seiring dengan dinamika kawasan perkotaan yang padat dan dekat dengan pusat pendidikan. Namun, berdasarkan observasi awal, masih banyak pekerja informal di daerah ini yang belum tergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang telah disediakan pemerintah dengan realitas sosial yang ada di lapangan. Rendahnya tingkat kepesertaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari hambatan ekonomi, ketidakpahaman terhadap manfaat jaminan sosial, hingga minimnya kepercayaan terhadap efektivitas program tersebut (Yulianti, 2021).

Dari perspektif kesejahteraan sosial, permasalahan ini tidak hanya menyangkut kurangnya sosialisasi, tetapi juga menyangkut dinamika struktural, kultural, dan psikososial yang membentuk perilaku pekerja informal terhadap jaminan sosial (Rahman, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap peran BPJS Ketenagakerjaan secara lebih spesifik dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja informal, khususnya di wilayah Padang Bulan, Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja informal di Padang Bulan, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi program ini. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan kontekstual bagi kelompok pekerja rentan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moloeng (2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini juga berasal dari tindakan yang dijadikan sebagai pemahaman berdasarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat, khususnya para pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPJS Ketenagakerjaan telah lama dikenal sebagai salah satu mekanisme perlindungan finansial dalam menghadapi risiko kerja yang tidak terduga. Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada pekerja informal di Kota Medan. Pekerja informal merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap berbagai risiko kerja, karena sifat pekerjaan mereka yang tidak tetap dan tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja (Marzuki, 2021). Tanpa kontrak kerja, tanpa perlindungan hukum ketenagakerjaan, dan tanpa akses jaminan sosial secara otomatis, pekerja informal sangat tergantung pada inisiatif pribadi untuk memperoleh perlindungan dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, atau kematian.

Kehadiran program jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja informal, yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Program-program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk mengurangi kerentanan ekonomi yang mereka hadapi, khususnya ketika terjadi peristiwa kerja yang tidak terduga (Indah, 2024).

Keterlibatan pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Medan sangat dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat pemahaman terhadap manfaat program, efektivitas sosialisasi, serta kesadaran akan pentingnya jaminan sosial. Pekerja yang memiliki akses terhadap informasi

mengenai hak dan manfaat perlindungan kerja cenderung lebih bersedia menjadi peserta. Namun demikian, masih banyak pekerja informal yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian dari mereka menganggap bahwa proses pendaftaran terlalu birokratis, atau memiliki persepsi negatif bahwa manfaat program tidak sebanding dengan iuran yang harus dibayar. Pandangan semacam ini menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam program, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan kampanye publik (Sihombing, 2024).

Di samping itu, faktor ketidakmampuan finansial juga menjadi alasan utama mengapa banyak pekerja informal belum tergabung. Meski iuran BPJS untuk peserta Bukan Penerima Upah (BPU) tergolong rendah secara nominal, pendapatan mereka yang fluktuatif membuat sulit untuk membayar iuran secara rutin. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pendekatan strategis seperti subsidi iuran, kemudahan administrasi, serta digitalisasi proses pendaftaran perlu diperkuat agar lebih ramah terhadap kelompok pekerja informal.

Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan membawa dampak nyata terhadap kesejahteraan ekonomi pekerja informal. Salah satu manfaat utama adalah perlindungan terhadap risiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Pekerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki jaminan kompensasi ketika mengalami risiko tersebut, sehingga tidak harus menanggung sendiri beban ekonomi yang ditimbulkan. Perlindungan semacam ini memberikan rasa aman dalam bekerja dan menghindarkan keluarga dari krisis ekonomi mendadak akibat peristiwa tak terduga (Pratiwi et al., 2022).

Lebih dari sekadar perlindungan finansial, program BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan efek psikologis positif. Pekerja informal yang merasa aman secara sosial lebih termotivasi dalam bekerja dan memiliki produktivitas yang lebih stabil. Rasa aman ini mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih tenang tanpa kecemasan berlebihan terhadap risiko kerja, yang pada akhirnya berdampak positif pada kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Hulu et al., 2024).

Kualitas hidup merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur dampak kebijakan jaminan sosial, termasuk jaminan ketenagakerjaan. Melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja informal memperoleh perlindungan dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Perlindungan ini memberikan rasa aman yang signifikan bagi pekerja dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan adanya jaminan tersebut, beban kecemasan terhadap risiko kerja yang tak terduga dapat berkurang, sehingga berdampak langsung pada penurunan tingkat stres dan ketegangan psikologis.

Pekerja informal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan cenderung lebih tenang dan fokus dalam bekerja, karena mereka memiliki kepastian bahwa apabila terjadi kecelakaan atau kejadian yang mengancam penghasilan, terdapat perlindungan yang siap menanggung beban finansial. Selain itu, program seperti Jaminan Hari Tua (JHT) juga memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan tanpa jaminan sosial. Akses terhadap perlindungan ini, meskipun bukan layanan medis secara langsung, tetap memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup karena mengurangi beban pikiran dan memberikan rasa aman sosial ekonomi yang lebih stabil bagi pekerja dan keluarganya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja informal di Padang Bulan, Kota Medan. Program jaminan sosial yang ditawarkan, seperti JKK, JKM, dan JHT, memberikan perlindungan penting terhadap risiko kerja yang sering kali dihadapi oleh pekerja informal. Partisipasi dalam program ini berkontribusi pada meningkatnya rasa aman, produktivitas kerja, dan kualitas hidup para pekerja.

Namun demikian, tingkat kepesertaan pekerja informal masih rendah akibat sejumlah kendala, antara lain: minimnya pengetahuan tentang manfaat program, persepsi negatif terhadap layanan BPJS, keterbatasan ekonomi untuk membayar iuran secara rutin, serta prosedur administrasi yang dianggap rumit. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan berbasis komunitas, peningkatan literasi sosial dan digital, serta kebijakan afirmatif seperti subsidi iuran bagi kelompok rentan.

Dengan strategi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kondisi pekerja informal, BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

SARAN

Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif, masif, dan berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman pekerja informal terhadap manfaat dan prosedur kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Materi sosialisasi hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sederhana, melalui media yang mudah diakses, dan melibatkan tokoh masyarakat setempat.

REFERENSI

- Sutrisno, H. (2020). Pengaruh bpjs ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 78-84.
- Claudia, V., & Syahril, S. (2024). Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) di Kota Meulaboh. *Regress: Journal of Economics & Management*, 3(3), 159-163.
- Sihombing, I. L., & Ritonga, F. U. (2024). Manfaat Program Layanan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kesejahteraan Masyarakat:(Magang Mitra USU di BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 322-327.
- Pradina, E., & Lubis, F. A. (2023). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) di Tanjung Morawa. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).